

MENGAKU RUGI SAMPAI RP 190 M

## Korban Jogja Eco Wisata Mengadu ke Komisi A

**SLEMAN (KR)** - Perwakilan Paguyuban Korban Jogja Eco Wisata mengadu ke Komisi A DPRD Kabupaten Sleman, Selasa (16/5). Para korban mengaku resah adanya kabar tentang penyalahgunaan Tanah Kas Desa (TKD) tanpa izin Gubernur DIY. Dalam perkara ini, para korban Jogja Eco Wisata mengalami kerugian sekitar Rp 190 miliar. Para korban meminta adanya legalitas dari Jogja Eco Wisata agar bisa menempati dengan tenang.

AW, salah satu perwakilan korban mengaku para korban ini sebenarnya sudah resah sejak dua tahun lalu karena proses pembangunan Jogja Eco Wisata ini mulai tak jelas. Keresahan mulai memuncak setelah ada berita penangkapan RS selaku pengembang Jogja Eco Wisata yang diduga menyalahgunakan TKD.

"Begitu ada berita itu, kami mulai resah karena pembangunan dan fasilitas yang ditawarkan pengembang belum selesai dibangun. Makanya kami datang ke DPRD untuk mengadu permasalahan ini," katanya.

Para korban berharap dapat difasilitasi oleh DPRD Kabupaten Sleman agar para korban mendapat legalitasnya. Sehingga para korban dapat menikmati

dan menghuni dengan tenang. "Kami hanya ingin mendapat legalitasnya, yaitu bisa menempati selama 20 tahun sesuai yang dijanjikan pengembang. Jika harus ada kewajiban untuk mengurus perizinan, ya kami siap. Meskipun itu sebenarnya kewajiban dari pengembang," tutur AW.

Menurutnya, Jogja Eco



KR-Saifullah Nur Ichwan  
**Komisi A DPRD Sleman saat menerima perwakilan Paguyuban Korban Eco Wisata.**

Wisata ini ada 800 unit bangunan dengan total investor sekitar 400 orang. Kemudian yang sudah tergabung dalam Paguyuban Korban Jogja Eco Wisata ada sekitar 182 orang. Akibat permasalahan ini, kerugian korban ditaksir sekitar Rp 160 miliar sampai Rp 190 miliar. "Hampir 90 persen korban ini sudah membayar lunas yakni sekitar Rp 200 juta hingga Rp 250 juta untuk villa. Tapi mayoritas belum mendapat unit villa atau ruko. Sehingga kerugian korban ini mencapai ratusan miliar," ucapnya.

Terkait aduan ini, Wakil Ketua Komisi A DPRD Sleman Ani Martanti ST menegaskan, DPRD Sleman

tidak mempunyai kewenangan mengenai izin TKD. Pemberian izin untuk peng-

gunaan dan pemanfaatan TKD itu merupakan kewenangan penuh dari Gubernur

DIY. "Kami tidak bisa berbuat banyak mengenai izin TKD.

Soalnya itu merupakan kewenangan Gubernur DIY," ujarnya. (Sni)-f

## MoU DINKOP UKM DIY - BANK MANDIRI Dukung Digitalisasi Koperasi dan UKM



KR-Juvintarto  
Vice President - Area Head Bank Mandiri Yogyakarta Region VII / Jawa 2, Evi Martiani (kiri) dan Kadinkop UKM DIY Ir Sri Nurkyatsiwi MMA menunjukkan naskah Perjanjian Kerjasama (MoU) yang sudah ditandatangani

**YOGYA (KR)** -- Memanfaatkan jasa perbankan untuk mendukung digitalisasi koperasi dan usaha kecil menengah (UKM), Pemda Yogyakarta melalui Dinas Koperasi dan UKM DIY melakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Selasa (16/5) siang di Sasanti Restoran, Jalan Palagan Tentara Pelajar No. 52, Ngaglik, Sleman, DIY.

"Saat ini di wilayah DIY, di empat Kabupaten dan 1 Kota sudah terdaftar 340.000 UKM tergabung dalam Platform Digital SiBakul. Kerjasama dengan Bank Mandiri akan menambah link, jejaring juga keamanan dalam transaksi digital," ungkap Kepala Dinkop UKM DIY Ir Sri Nurkyatsiwi MMA dalam sambutannya saat penandatanganan MoU.

Penandatanganan MoU bersama Vice President - Area Head Bank Mandiri Yogyakarta Region VII / Jawa 2, Evi Martiani dengan disaksikan jajaran Manager Bank Mandiri DIY, serta Kabid dan Staf Dinkop UKM DIY. "Dinkop UKM DIY melakukan pendampingan UKM anggota SiBakul dengan pembinaan pelatihan juga turut memasarkan secara digital, mendorong UKM naik kelas, saat ini 90 persen usaha masih mikro sehingga harus terus didorong naik kelas," jelas Siwi panggilan akrabnya.

Sedang Evi Martiani menyebutkan kerjasama perbankan dalam transaksi/pembayaran digital juga untuk keamanan dan antipati penipuan selain juga

memperluas jaringan. Evi mencontohkan ada nasabah UKM yang menerima bukti transfer bank lewat WA dan ternyata hanya editan dan menjadi korban penipuan.

"Bank Mandiri mempunyai produk Livin untuk E Banking yang keanggotaannya di DIY mencapai

500 ribu nasabah dari angka nasional yang mencapai 50 juta nasabah. Dari 250 juta penduduk Indonesia yang reliable perbankan potensinya mencapai 180 juta, sehingga masih terbuka luas," jelas Evi.

Evi menjelaskan fasilitas E Commerce dari Bank Mandiri maka pelaku UMKM bisa langsung bertransaksi cashless dengan aman dan bukti jelas. "Bahkan transaksi global dengan cashless E Commerce jauh lebih murah dibanding transfer antar bank, apalagi dengan bank luar negeri," jelasnya menyebutkan target transaksi E Commerce wilayah DIY - Jawa Tengah mencapai Rp 7,8 T setahun.

Dalam MoU tersebut Bank Mandiri akan memberikan pemanfaatan jasa dan produk perbankan dan layanan untuk pengembangan jasa perbankan yang mendukung program-program pembangunan dan pelayanan publik dari Dinkop UKM DIY, dukungan teknis pemberdayaan UMKM. Serta program-program lain yang disepakati para pihak sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan. (Vin)



KR-Juvintarto  
Penandatanganan MoU dihadiri jajaran Manajer Bank Mandiri se DIY serta Kabid dan Staf Dinkop UKM DIY



KR-Juvintarto  
Kadinkop UKM DIY Ir Sri Nurkyatsiwi MMA saat memberikan sambutan

## SMAN I Godean Gelar Pentas Seni Budaya

**GODEAN (KR)** - Mengakhiri kegiatan akhir tahun ajaran 2022/2023, SMAN I Godean menggelar pentas seni karawitan yang dikolaborasi dengan seni tari di Pendapa Kapanewon Godean, Senin (15/5). Selain sebagai sarana unjuk kebolehan hasil latihan yang telah dilakukan, pentas seni ini juga sebagai sarana pelestarian budaya pening-

galan nenek moyang. Pentas seni dibawakan sejumlah siswa yang tergabung dalam kelompok seni karawitan Laras Puspapaksi SMAN I Godean ini menampilkan 15 gending. Setiap tampil beberapa gending, diselingi pementasan seni tari.

Menurut Kepala SMAN I Godean Surahman SPd MPd, sesuai visi sekolah

yaitu terwujudnya lulusan berakhlak mulia, berprestasi, berbudaya, berwawasan lingkungan dan berkebhinekaan global, SMAN I Godean tidak hanya mengutamakan pendidikan bidang akademik saja. Tetapi berbagai kegiatan yang masuk dalam ranah visi sekolah termasuk pendidikan budi pekerti dan upaya pelestarian budaya juga dilakukan.

"Siswa yang mengikuti ekstra kurikulum seni budaya ini juga diberi kesempatan untuk menampilkan kemampuannya. Untuk menumbuhkan kebanggaan para siswa, pentas seni karawitan Laras Puspapaksi SMAN I Godean ini juga akan ditayangkan di Jogja TV melalui program Langen Laras pada pukul 17.00 WIB tanggal 21 Mei 2023 mendatang," kata Surahman. (Has)-f



KR-Istimewa

**Pelajar SMAN I Godean Sleman unjuk kebolehan pentas seni tari.**

## DPRD KABUPATEN SLEMAN

# SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274)868413, Fax (0274)868413

### KINERJA KOMISI D DPRD KABUPATEN SLEMAN

## Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Secara Utuh



KR-Saifullah Nur Ichwan  
**Respati Agus Sasangka SIP**

**SLEMAN (KR)** - Angka kemiskinan di Kabupaten Sleman berdasarkan perhitungan BPS Tahun 2022 sebesar 7,74 persen dan Sistem Informasi Manajemen Kemiskinan Sleman pada Tahun 2022 sebesar 8,15 persen. Hal itu dinilai masih cukup tinggi. Tentu ini menjadi 'PR' bagi semua pihak, baik itu eksekutif, legislatif maupun stake holder lainnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara nyata dan utuh. Di antaranya bagaimana menemukan solusi memecahkan permasalahan sosial

yang selama ini dihadapi warga miskin.

Anggota Komisi D DPRD Sleman Respati Agus Sasangka SIP mengemukakan, pada masa pandemi Covid-19 kemarin, menjadi penyumbang meningkatnya angka kemiskinan di Kabupaten Sleman. Dengan berakhirnya pandemi ini, pemerintah daerah perlu memastikan warga miskin ini memang benar-benar miskin atau hanya merasa miskin.

"Kalau kita bandingkan dengan daerah lain, untuk menemukan warga yang miskin atau tidak berdaya, seharusnya tidak sebesar itu. Makanya perlu dipastikan bahwa mereka itu benar-benar miskin atau hanya merasa miskin," kata Respati atau yang kerap disapa Ade ini, Selasa (16/5).

Selama bantuan sosial dan Jaringan Pengaman Sosial (JPS) masih cukup tinggi, itu menandakan problem sosial di masyarakat juga masih cukup banyak. Untuk meng-

atasi itu, pemerintah daerah dapat menggandeng perguruan tinggi atau stake holder lainnya guna menemukan solusi yang tepat dalam pengentasan kemiskinan di Sleman.

"Di Sleman itu banyak perguruan tinggi dan orang-orang hebat. Gandeng saja untuk ikut berkontribusi dalam men-

cari solusi yang tepat dalam mengatasi problem sosial," ucap Ketua Fraksi PAN ini.

Selain itu, pemerintah daerah juga dapat mengambil kebijakan dan mensuport anggaran untuk kegiatan yang arahnya pemberdayaan masyarakat. Dimana pemberdayaan itu harus disesuaikan

dengan minat, bakat dan kebutuhan dari warga miskin.

"Jadi tidak bisa dengan satu kegiatan atau pemberdayaan itu bisa menjadi solusi memecahkan angka kemiskinan. Mungkin untuk mengentaskan 10 warga miskin itu juga butuh 10 solusi karena minat, bakat dan kebutuhan

mereka berbeda-beda. Supaya nanti bisa mewujudkan kesejahteraan secara nyata dan utuh," tutur Ade.

Hal sama juga dikatakan Anggota Komisi D lainnya, Indra Bangsawan SE. Menurutnya, dalam pengentasan kemiskinan ini tidak hanya tanggungjawab dari pemerintah saja. Namun stake holder juga mempunyai peran dalam penanggulangan kemiskinan. "Dalam hal ini, masyarakat juga perlu ada sumbangsih untuk pengentasan kemiskinan di Sleman. Ketika diatasi secara bersama-sama, tentu kemiskinan akan lebih mudah teratasi," terangnya.

Memang dalam penanganan kemiskinan itu tidak hanya bisa dilakukan dengan satu solusi. Namun perlu adanya berbagai solusi dalam rangka memberdayakan masyarakat miskin agar lebih mandiri secara ekonomi. "Faktor kemiskinan ini bermacam-macam. Tentu untuk mengatasinya juga perlu berbeda-beda. Su-



KR-Istimewa  
**Indra Bangsawan SE**

paya penanganan itu bisa efektif dan efisien," ucap anggota Fraksi Golkar ini.

Kemudian bagi masyarakat miskin yang memang sangat membutuhkan bantuan sosial seperti Jaringan Pengaman Sosial (JPS), Indra meminta pencairannya supaya dipercepat. Mengingat bantuan itu sangat dibutuhkan masyarakat. "JPS ini memang sangat bermanfaat ketika masyarakat miskin itu belum mandiri secara ekonomi. Kami berharap pencairannya lebih cepat, misalnya untuk JPS pendidikan," pintanya. (Sni)-f



KR-Istimewa  
**Komisi D saat melakukan studi tiru ke Surabaya.**